

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Karanganyar

Halaman 15

## Program Lain Digeser, Rp65 Miliar untuk Penanganan Pandemi

KARANGANYAR—Pembekab Karanganyar merealokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar 2020 senilai Rp65 miliar untuk penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pembekab) Karanganyar merasionalisasi dan merealokasi APBD Kabupaten Karanganyar Rp65 miliar. Perinciannya Rp14 miliar untuk kesehatan, Rp29 miliar untuk jaring pengaman sosial, dan Rp20 miliar untuk dampak sosial. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Karanganyar menggeser anggaran Rp1,4 miliar untuk warga terdampak Covid-19 dalam bentuk paket sembako.

"Rasionalisasi dan realokasi anggaran sesuai petunjuk Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Digeser-geser dana yang untuk belanja barang dan jasa, belanja modal. Ada yang sudah jalan untuk penanganan Covid-19. Dari dana tak tersangka OPD terkait," kata Bagus saat dihubungi *Espos*, Senin (4/5).

Dia mencontohkan sejumlah pergeseran anggaran, yakni dana untuk pembangunan Gedung Wanita ditunda sehingga penghapusan aset ditunda, angsuran pinjaman Bank Jateng dijadwalkan ulang, silpa, dan lain-lain. Bagus berharap Pembekab Karanganyar

segera menyelesaikan pendataan sehingga bantuan untuk warga terdampak Covid-19 segera tersalurkan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Tony Hatmoko menjelaskan dana Rp49 miliar yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dan dampak sosial digunakan untuk menyediakan sembako dan penanganan usaha terdampak Covid-19. Penyediaan sembako dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos).

"Sudah membahas dengan TAPD dengan Bupati. Ada untuk sembako dan yang lain untuk skema pengentasan bidang lain. Sesuai instruksi itu kan harus menyediakan anggaran dari APBD untuk penanganan Covid-19," tutur dia.

Tony berharap Pembekab mendata calon penerima bantuan secara hati-hati dan valid. Pertimbangannya adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa mengucurkan bantuan. Dia berharap seluruh bantuan tidak tumpang tindih. "Jadi tidak ada orang satu bisa menerima beberapa bantuan. Kalau bisa rata. Untuk itu kami harap ada transparansi data di tingkat desa. Siapa yang dapat bantuan. Kalau perlu data dipasang biar orang baca." (*Sri Sumi Handayani*)